

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari keadaan perkembangan perekonomian suatu wilayah dan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya akan membuahkan hasil, misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Eri & Rifki, 2022). Peningkatan aktivitas perekonomian hingga pendapatan nasional adalah indikator utama bahwa ekonomi suatu negara sedang mengalami pertumbuhan (Susilowati & Adianita, 2023). Untuk mengukur kemajuan kinerja perekonomian selama pertumbuhan ekonomi, banyak indikator yang harus diperhatikan. Indikator ini digunakan baik pada tingkat nasional maupun daerah (regional). Ketika masyarakat lebih baik, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat memenuhi tugas-tugas sipil yang diamanatkan oleh pemerintah daerah (Eri & Rifki, 2022).

Untuk mengetahui pembangunan suatu daerah, maka harus mengetahui pertumbuhan ekonominya (Putri et al., 2022). Sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari data PDRB. Mendapatkan dan memahami peran masing-masing sektor ekonomi dalam menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, berdasarkan data PDRB, pemerintah daerah dapat merumuskan atau merencanakan kebijakan yang tepat. Secara teori, seiring dengan meningkatnya luas produk domestik regional bruto (PDRB), maka semakin besar pendapatan pemerintah, serta semakin besar pula pengeluaran

pemerintah federal untuk meningkatkan berbagai manfaat pelayanan publik di bidang tersebut (Lutherani et al., 2023).

Namun, hal itu berbanding dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selama periode pembangunan ekonomi, Kabupaten Bojonegoro mengalami perubahan struktur ekonomi antara tahun 2008 hingga 2022 (Iverson & Dervan, 2023). Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan faktor internal yaitu perubahan permintaan dan penawaran yang lebih dipengaruhi oleh kemajuan dan perubahan perilaku bagian akhir dari setiap pengeluaran, namun juga faktor penyebab eksternal. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro mempunyai kedudukan penting sebagai wilayah perbatasan antar wilayah (Na & Hipertensiva, 2021).

Beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai perkembangan kawasan ini adalah sebagian besar wilayah administrasi Bojonegoro merupakan sektor pertanian dan pertambangan (Dinas Komunikasi & Informasi Kabupaten Bojonegoro, 2020). Oleh karena itu, dalam pembangunan perlu memperhatikan ketersediaan lahan, kondisi wilayah, jenis tanah, agroklimat, sarana dan prasarana wilayah. Pada akhirnya, sifat dan kondisi tersebut akan mempengaruhi prospek pengembangan dan pengembangan kawasan tersebut (Maiti & Bidinger, 2018).

Tabel 1. 1 PDRB Atas Harga Konstan Di Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Satuan
2008	7.505,83
2009	7.990,98
2010	33.291,90
2011	36.751,54
2012	38.136,10
2013	39.039,43
2014	39.934,85
2015	46.892,89
2016	57.187,40
2017	63.046,55
2018	65.815,61
2019	69.985,70
2020	69.703,49
2021	65.839,50
2022	61.782,90

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2023)

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas harga konstan di Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan dari tahun 2008 yakni sebesar 7.505,83 persen menjadi 69.985,7 persen di tahun 2019. Namun sejak tahun 2020 hingga 2022, PDRB Atas Harga Konstan di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontraksi terjadi selama 2020 hingga 2022, yakni 69.703,49 persen (2020), 65.839,50 persen (2021) dan 61.782,90 persen (2022), sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tumbuh secara lambat. Akan tetapi pada sektor ekonomi non-migas selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya yang signifikan pada tahun 2008 hingga 2022, dimana salah satu sektor ekonomi non-migas yang lebih dominan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian.

Dan ada faktor lain yang dapat meningkatkan PDRB yaitu pembangunan manusia.

Pembangunan manusia merupakan suatu proses dan suatu hasil, yang berarti peningkatan pilihan masyarakat menjadi tujuan (Elistia & Syahzuni, 2018). Dalam indeks pembangunan manusia (IPM), terdapat tiga dimensi penting terkait pembangunan manusia (Kusharjanto & Kim, 2015). Untuk memahami konsep pembangunan manusia, pembangunan harus dipahami dari sudut pandang kemanusiaan, bukan hanya dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Undang-Undang Tahun 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan masyarakat” yang juga mempunyai pengertian memberdayakan masyarakat (Herinoto et al., 2021).

Terdapat tiga indikator dalam Indeks Pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara, yaitu: 1. Tingkat kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (angka kematian bayi); 2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah orang yang terdidik atau tingkat pendidikan yang diperoleh atau lamanya pendidikan orang tersebut; 3. Standar hidup diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita tahunan. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi, dan faktor lain seperti ketersediaan wilayah atau lapangan kerja menjadi penentu kemajuan perekonomian, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga Indeks Pembangunan akan meningkat (Lutherani et al., 2023).

Secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Endang, 2022). Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat dicapai jika seluruh sumber daya bekerja sama (Hermawati et al., 2018). Hal ini terutama berlaku untuk hambatan budaya, seperti nilai-nilai lokal dan sisi modal.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	Indonesia
2008	65,83	70,38	71,17
2009	66,38	71,06	71,76
2010	66,92	71,62	72,27
2011	63,22	63,22	67,09
2012	64,20	64,21	67,71
2013	64,85	64,85	68,31
2014	65,27	65,27	68,92
2015	66,17	66,17	69,55
2016	66,73	66,73	70,18
2017	67,28	67,28	70,81
2018	67,85	67,85	71,39
2019	68,75	68,75	71,92
2020	69,04	69,04	74,92
2021	69,59	69,59	72,29
2022	70,12	70,12	72,91

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya terus mengalami perbaikan sehingga mempengaruhi pertumbuhan seluruh indikatornya. Hal ini mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran per kapita tahunan. Hasil indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro terus

membraik. Pada tahun 2021 indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke-4 tertinggi se-Jawa Timur (Kepala BPS Pemprov Jatim, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan akibat adanya wabah Covid-19 pada tahun 2020. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro berada pada sektor tengah dan masih berada pada angka 0,41 persen untuk masuk kriteria tinggi. Sementara itu, penyebab nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro masih berada pada rata-rata sektoral adalah karena sekolah yang memiliki siswa tidak mencapai rasio siswa terhadap guru. Namun, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyetujui program hibah pendidikan yang berupaya mengelola dan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, pembangunan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) akan terus meningkat dengan dukungan faktor lain, terutama pembangunan infrastruktur (Herinoto et al., 2021).

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) infrastruktur ekonomi, yang meliputi infrastruktur fisik yang digunakan dalam proses produksi dan masyarakat, meliputi jalan, listrik, telepon, transportasi, irigasi dan berkebun, air minum dan sanitasi, serta limbah. pembuangan. eliminasi; (2) infrastruktur sosial, yang meliputi infrastruktur sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan nilai ekonomi (Randa, 2023). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

negara dan pertumbuhan ekonomi di wilayah manapun, pemerintah memegang peranan penting sebagai penggerak pendukung proses pembangunan. Perkembangan wilayah mengarah pada pembangunan infrastrukturnya (SUGIARTO & TJIPTO SUBROTO, 2019).

Tiga faktor utama yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur menurut integrasi ekonomi, yang pertama akuisisi atau pembangunan infrastruktur baru sangat penting untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, besarnya ketersediaan pembangunan infrastruktur berdampak pada kemudahan kegiatan investasi dan dunia usaha. Terakhir, semua perhatian yang diberikan untuk mendorong pembangunan dapat mengandalkan sumber daya ekonomi (Randa, 2023).

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang digunakan dalam aktivitas perekonomian, baik untuk individu maupun kelompok (Dai et al., 2023). Oleh karena itu, infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas fisik yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian (Elia; & Endang, 2023). Sementara itu, industri konstruksi memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur yang membantu meningkatkan aspek pariwisata, bisnis, dan sosial kota lainnya. Jika tersedia infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung distribusi barang, jasa, permodalan dan informasi, maka akan berdampak positif lainnya, seperti turunnya harga barang dan jasa di pasar (Yu et al., 2023).

Infrastruktur memiliki keterkaitan ke depan dibandingkan keterkaitan ke belakang (Abdullah, 2014). Artinya, infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan output sektor lain untuk dijadikan input, bukan meningkatkan outputnya sendiri. Infrastruktur lebih mungkin mendorong pertumbuhan di wilayah hulu dibandingkan di wilayah hilir. Infrastruktur juga berperan dalam proses produksi dan sangat penting bagi pemerintah serta sektor ekonomi karena mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian (Pradhan et al., 2021).

Pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, kualitas yang buruk atau rendahnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif dan menurun (Randa, 2023). Salah satu alasan pemerintah banyak membangun fasilitas di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar ekspansi perekonomian dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Bojonegoro. Untuk menunjang sektor perekonomian lainnya di Kabupaten Bojonegoro diperlukan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan (Na & Hipertensiva, 2020). Sejalan dengan program kerja pemerintah, Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperbaiki infrastruktur yang ada. Untuk melakukan hal ini, mereka fokus pada perencanaan politik dan rencana pembangunan infrastruktur (Pusat & Kabupaten, 2018).

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kabupaten/Kota (Km)	Provinsi (Km)	Negara/Nasional (Km)
2008	627,85	387,39	346,28
2009	628,789	401,25	385,70
2010	628,789	480,20	385,70
2011	628,789	532,91	385,70
2012	628,789	536,42	385,70
2013	628,789	536,42	424,22
2014	563,153	536,42	385,70
2015	628,789	535,28	464,32
2016	628,789	554,16	470,17
2017	628,789	554,16	470,17
2018	628,789	545,54	470,17
2019	1.626,54	545,54	470,17
2020	1.626,54	547,49	470,24
2021	1.626,54	548,45	470,24
2022	1.626,54	545,51	470,17

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2023)

Terlihat dari tabel 1.3 di atas bahwa keadaan infrastruktur Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008 hingga tahun 2022 terus mengalami perbaikan. Bahkan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pembenahan infrastruktur jalan melalui perbaikan jalan aspal dan pelebaran jalan untuk meningkatkan daya saing produk nasional serta memperlancar distribusi barang, jasa dan informasi secara efektif. Material yang ada, yang kualitas dan kuantitasnya terbatas dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur. Jumlah sumber daya ini meningkat seiring dengan kebutuhan setiap individu dan pertumbuhan penduduk.

Penduduk merupakan individu yang tinggal di wilayah Republik Indonesia selama setengah tahun dan memiliki niat untuk menetap di sana

(Safitri & Endang, 2024). Pertambahan jumlah penduduk dengan cepat akan menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang disebut infrastruktur (Lapian et al., 2023). Anggaran modal pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan infrastruktur, baik untuk infrastruktur publik maupun untuk efisiensi operasional pemerintahan. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Konsentrasi modal akan memungkinkan adanya pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Akibat dari akumulasi uang adalah peningkatan investasi (modal) pada saham yang seharusnya meningkatkan kemajuan teknologi dan meningkatkan pendapatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan (kemakmuran) penduduk (Rakhmawan et al., 2023).

Penduduk bertanggung jawab untuk meningkatkan kekayaan melalui dua cara: pertama, penduduk bertindak sebagai konsumen dalam hal permintaan dan bertindak sebagai produsen dalam hal pasokan (Sarkodie & Adams, 2020). Oleh karena itu, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk memproduksi dan menyerap produk-produk tersebut, maka pesatnya pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan tingkat pendapatan, karena pertambahan jumlah penduduk yang tidak mempunyai uang tidak mempunyai arti bagi pembangunan ekonomi. Besarnya kekurangan sumber daya manusia yang memadai dapat memberikan beban terhadap pembangunan, hal ini

menunjukkan bahwa beban tersebut ada pada pemerintah federal dan daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja dan lingkungan hidup (Yenny & Anwar, 2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro memang tidak banyak, namun pertumbuhan penduduk akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Yenny & Anwar, 2020). Untuk melihat perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)
2008	12.027,59
2009	12.075,19
2010	12.123,01
2011	12.177,75
2012	12.230,79
2013	12.277,04
2014	12.323,86
2015	12.366,07
2016	12.403,83
2017	12.439,06
2018	12.469,27
2019	12.496,92
2020	13.016,35
2021	13.076,02
2022	13.151,25

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di Pemerintahan Bojonegoro diyakini disebabkan oleh kelahiran, migrasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, besar kemungkinan akan terjadi ledakan dan menimbulkan berbagai permasalahan

seperti peningkatan angka kriminalitas, peningkatan jumlah penduduk dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan kebijakan di masa depan.

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), infrastruktur dan jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun ada beberapa hal yang menarik, seperti antara tahun 2020 hingga 2022, dimana infrastruktur pada tahun tersebut masih stabil sebesar 1.626,54 persen dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 69.703,49 persen pada tahun 2020, kemudian dari 65.839,50 persen pada tahun 2021, dan 61.782,90 persen pada tahun 2022.

Permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro yang menurun disebabkan oleh minyak dan gas. Sedangkan ketika jumlah barang dan jasa atau produksi migas menurun, maka pendapatan pun menurun. Masalah ini penting untuk dikaji karena ketika indeks pembangunan manusia (IPM), infrastruktur dan jumlah penduduk terus meningkat maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat, namun pertumbuhan ekonomi dan Kabupaten Bojonegoro justru mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan, jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi. Maka disini penulis tertarik dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan indeks pembangunan manusia (IPM) (X1), indeks pembangunan infrastruktur (X2) dan jumlah penduduk (X3) terhadap kinerja pembangunan ekonomi (Y) di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial indeks pembangunan manusia (IPM) (X1), indeks pembangunan infrastruktur (X2) dan jumlah penduduk (X3) terhadap kinerja pembangunan ekonomi (Y) di Kabupaten Bojonegoro?
3. Manakah diantara variabel indeks pembangunan manusia (IPM) (X1), indeks pembangunan infrastruktur (X2) dan jumlah penduduk (X3) yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan ekonomi (Y) di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan infrastruktur dan jumlah penduduk terhadap kinerja pembangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan infrastruktur dan jumlah penduduk terhadap kinerja pembangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui pengaruh dominan antara indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan infrastruktur dan jumlah penduduk terhadap kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak, antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber belajar di perpustakaan dan dapat menjadi perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahkan meningkatkan pengetahuan maupun wawasan dalam membuat dan melakukan penelitian terkait dengan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan infrastruktur dan jumlah penduduk terhadap kinerja pembangunan ekonomi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu menyediakan sumbangan kontribusi atau masukan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga untuk pertimbangan dalam rangka untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan pada penelitian. Beberapa batasan yang dialami oleh peneliti saat melakukan penelitian yaitu data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data time series. Variabel yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.